

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SEBAGAI DEBITOR
ATAS HAK TANGGUNGAN DALAM PUTUSAN
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Lukman Nulhakim

201610115025



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
SEBAGAI DEBITOR ATAS HAK TANGGUNGAN
DALAM PUTUSAN LEMBAGA PERADILAN
INDONESIA

Nama Mahasiswa : LUKMAN NULHAKIM

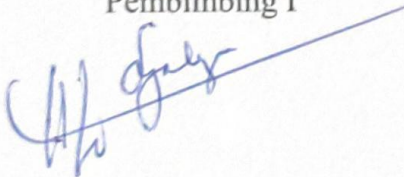
Nomor Pokok
Mahasiswa : 201610115025

Program Studi /
Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 20 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H
NIDN. 0328106604

Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H
NIDN. 0324017702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI
DEBITOR ATAS HAK TANGGUNGAN DALAM
PUTUSAN LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

Nama Mahasiswa : LUKMAN NULHAKIM

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115025

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juli 2023

Bekasi, 27 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H

NIDN. 0328106604

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H

NIDN. 0307037003

Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H

NIDN. 0322078304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukman NulHakim
NPM : 201610115025
TTL : Cirebon, 20 November 1995
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Aspek Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Debitor Atas Hak Tanggungan Dalam Putusan Lembaga Peradilan Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juni 2023

Yang menandatangani pernyataan


METERAI TEMPEL
32 JABAKX399702953

Lukman NulHakim

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUKMAN NULHAKIM

NPM : 201610115025

TTL : Cirebon, 20 November 1995

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Aspek Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Debitor Atas Hak Tanggungan Dalam Putusan Lembaga Peradilan Indonesia** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan


METERAI TEMPEL
72CDFAKX399702952
Lukman Nulhakim

ABSTRAK

Lukman NulHakim, 201610115025, Aspek Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Debitor Atas Hak Tanggungan Dalam Putusan Lembaga Peradilan Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah mengatur dan menetapkan bahwa suatu sengketa konsumen dapat diselesaikan baik melalui Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan umum, sedangkan penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan. Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan umum tampaknya tidak memihak dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen karena beberapa faktor, diantaranya lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hingga eksekusi putusannya, termasuk biaya yang tidak sedikit, prosedur dan birokrasi yang tidak sederhana. Sejumlah kendala yang mengakibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan jaminan VI keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai wujud perlindungan hukum kepada konsumen serta tidak menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Hal ini disebabkan keberadaan dan kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menjalankan tugas dan kewenangan yang bersifat multi fungsi sekaligus di bidang eksekutif, yudikatif dan advokasi, sehingga pemeriksaan dan putusannya tidak bersifat pro yustitia atau bersifat non yudicial. Tujuan Penulisan ini adalah menganalisis putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu bara Nomor 1473/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 mengenai sengketa konsumen atas Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan antara Yuli Fitriani selaku Konsumen dengan PT. BTPN. Selaku pelaku usaha, dan juga mempelajari langkah-langkah BPSK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada metode penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Lukman NulHakim, 201610115025, *Aspects of Consumer Legal Protection as Debtors of mortgage rights in the decision of the Indonesian judiciary.*

Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as the legal umbrella for consumer protection in Indonesia has regulated and stipulated that a consumer dispute can be resolved both through the Court and outside the Court. The settlement of consumer disputes through the Court is the absolute competence of the District Court as part of the general judiciary, while the settlement of consumer disputes outside the Court is carried out through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). Settlement of consumer disputes through the Court. The District Court as part of the general judiciary appears to be impartial and does not provide legal protection to consumers due to several factors, including the length of time it takes to resolve disputes until a Court decision has permanent legal force until the execution of the decision, including considerable costs, procedures and bureaucracy, which is not simple. A number of obstacles have resulted in the Consumer Dispute Settlement Agency being unable to carry out its duties and functions as a dispute resolution institution that provides VI guarantees of justice, legal certainty and benefits as a form of legal protection for consumers and does not guarantee a balance between the interests of consumers and business actors. This is due to the existence and position of the Consumer Dispute Settlement Body which carries out multi-functional duties and authorities at the same time in the executive, judicial and advocacy fields, so that its examinations and decisions are not pro-judicial or non-judicial in nature. The purpose of this writing is to analyze the decision of the Council of Consumer Dispute Settlement Board of Batubara Regency Number 1473/Arbitration/BPSK-BB/X/2016 concerning consumer disputes over the Credit Agreement with Mortgage Rights between Yuli Fitriani as a Consumer and PT. BTPN. As a business actor, he also studied BPSK's steps in providing protection to consumers. The approach method used is normative juridical. This research method also seeks to search for facts by providing the right interpretation of the data with the aim of making a systematic description, picture, or painting of facts about the problem the author is investigating. The data used are primary data and secondary data which are analyzed qualitatively.

Keywords: Consumer Protection Act, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan HidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan dalam skripsi ini memilih judul “Aspek Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Debitor Atas Hak Tanggungan Dalam Putusan Lembaga Peradilan Indonesia”. Penulisan menyadari bahwa penulisan dan materi dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

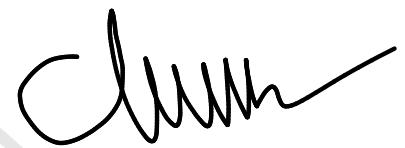
Penulis skripsi ini tentu tidak akan menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi yang telah mengorbankan waktu dan memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing teknis yang telah memberikan kontribusi bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sugito dan keluarga saya yang selalu memberikan dukungan moriil maupun materiil sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi pada Universitas Bhayangkara.
6. Isti Maulidiyah dan Rasyid Zain Baihaqi selaku istri dan anak saya yang saya cintai dan saya sayangi yang selalu memberikan dukungan semangat untuk mengerjakan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.
8. Teman-teman seperjuangan di PT. IPC TPK yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

9. Seluruh staf Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kantor wilayah walikota Bekasi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya Civitas Akademika Fakultas Hukum Bhayangkara.

Bekasi, 20 Juni 2023



Lukman Nulhakim

201610115025



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Teoritis	10
1.5 Kerangka Konseptual	14
1.6 Kerangka Pemikiran	17
1.7 Penelitian Terdahulu	18
1. I Wayan Yudistira (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PUU-XVII/2019	18

2.	Hana Tasya Zahrani (2020) Efektivitas Performa komite Antidumping Indonesia dalam, memberikan Perlindungan Hukum Pada Industri Lokal ...	18
3.	Ni Wayan Ella Apriyani Dan Ayu Putu Laksmi Danyathi (2014) Dumping dan Antidumping sebagai bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perlindungan Internasional.....	19
4.	Rokiah Alavi dan Haniff Ahamat (2004) Predasi dan kepentingan publik dalam penentuan bea masuk Antidumping WTO: Kasus Malaysia	20
1.1	Metode Penelitian	20
1.8.1	Pendekatan Penelitian	22
1.8.2	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
1.8.3	Teknik Pengumpulan Data	24
1.8.4	Metode Analisis	24
1.2	Sistematika Penulisan	24
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....		
		26
2.1	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	26
2.1.1	Pengertian Perlindungan Konsumen	27
2.2	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen	31
2.2.1	Asas Hukum Perlindungan Konsumen	31
2.2.2	Tujuan Perlindungan Konsumen	35
2.2.3	Pihak-pihak yang terkait dalam Perlindungan Konsumen.....	37
1.	Konsumen	37
2.	Pelaku Usaha	40
3.	Kewajiban Pelaku Usaha	41
2.2.4	Hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha	42
2.2.5	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	44
1.	Hak Konsumen	45
2.	Kewajiban Konsumen	49
2.2.6	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	49
1.	Hak Pelaku Usaha	49
2.	Kewajiban Pelaku Usaha	50

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)	51
3.1 Dasar Hukum Pembentukan Lembaga BPSK	51
3.2 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	52
3.3 Kasus Posisi dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri No. 143/Pdt.sus-BPSK/2016/PN.BKN	54
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SEBAGAI DEBITOR ATAS HAK TANGGUNGAN DALAM PUTUSAN LEMBAGA PERADILAN INDONESIA	59
4.1 Analisis Putusan BPSK Nomor 1473/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 terkait Perlindungan Terhadap Konsumen	59
4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Debitor Atas Hak Tanggungan dalam Putusan BPSK No. 1473/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016	62
4.1.2 Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 143/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Bkn	68
4.2 Aspek Kepastian Hukum Dalam Putusan BPSK Nomor 1473/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 944/K/Pdt.sus-BPSK/2017....	70
4.2.1 Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 1473/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016	70
4.2.2 Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung No.944/K/Pdt.sus-BPSK/2017	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UUHT	Undang-Undang Hak Tanggungan
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BW	Burgerlijk Weatboek



MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai”

PERSEMBAHAN :

Untuk Orang Tua Saya Bapak Sugito dan Suci Setiati

Untuk Mertua saya Bapak Ponirin dan Jumiati

Untuk Istriku Yang Tercinta Isti Maulidiyah

Untuk Anakku Tercinta Rasyid Zain Baihaqi

